

Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Indah Aminah Putri¹, Eza Okhy Awalia Br Nasution²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal, indahaminah@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, ezanasution@gmail.com

Abstrak

Dalam sistem ekonomi Islam, peran pemerintah sangat krusial. Pemerintah mengambil sikap tegas tidak hanya pada penerapan Syariah oleh masyarakat umum, tetapi juga pada kebijakan ekonomi, seperti Pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan serta pendidikan dan kesehatan dengan tetap menjaga kerahasiaan. Kontrak kerja, kontrol nilai tukar dan pencegahan kenaikan harga. Inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus memiliki sumber daya yang cukup sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dan satu-satunya aspek keuangan adalah uang. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dirancang untuk mengatur aliran uang dalam perekonomian guna menjaga stabilitas harga, inflasi terkendali, lapangan kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penulis artikel ini mencoba untuk menyelidiki dampak kebijakan moneter dan hubungannya dengan perkembangan sistem ekonomi Islam dari perspektif teoritis dan konseptual. Kajian tersebut menyatakan bahwa tidak ada perbedaan peran kebijakan moneter baik dalam perspektif ekonomi Islam maupun modern, kecuali bahwa dalam perspektif ekonomi Islam pemerintah harus menjamin terpeliharanya nilai-nilai pasar, seperti cadangan wajib dan pengaturan pembayaran bunga pinjaman, segala sesuatu yang dilakukan dalam bisnis ini dilakukan sesuai dengan prinsip Islam dan didasarkan pada praktik riba.

Kata kunci : Ekonomi Islam, Kebijakan Moneter, Pembangunan Ekonomi

Abstract

In the Islamic economic system, the role of government is very crucial. The government takes a firm stance not only on the implementation of Sharia by the general public, but also on economic policies, such as meeting basic needs such as clothing, food and shelter as well as education and health while maintaining confidentiality. Employment contracts, control of exchange rates and prevention of price increases. Inflation. To achieve this goal, the government must have sufficient resources in accordance with the goals and targets that have been set to support national economic growth. And the only financial aspect is money. Monetary policy is a policy designed to regulate the flow of money in the economy in order to maintain price stability, controlled inflation, full employment and sustainable economic growth. The author of this article attempts to investigate the impact of monetary policy and its relation to the development of the Islamic economic system from a theoretical and conceptual perspective. The study states that there is no difference in the role of monetary policy in both the Islamic and modern economic perspectives, except that in the Islamic economic perspective the government must guarantee the maintenance of values. market, such as mandatory reserves and loan interest payment arrangements, everything that is done in this business is done in accordance with Islamic principles and is based on the practice of usury

Keywords: Economic Development, Islamic Economics, Monetary Policy

Pendahuluan

Pemerintah menerapkan sebuah ketentuan atau kebijakan yang berencana untuk mengendalikan kestabilan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan dalam negeri guna mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat di setiap negara yang baru terpilih. Pendirian bank sentral, khususnya melalui depresiasi mata uang dan suku bunga, serta implementasi rencana tersebut, merupakan aspek dari kebangkitan kembali program

pembangunan moneter otoritas.¹ Dalam perekonomian, mata uang sangat penting, dan diharapkan hal ini akan memungkinkan fokus pada stabilitas harga dan peningkatan output.²

Kebijakan moneter merupakan media yang digunakan bank sentral untuk mengelola berbagai variabel keuangan, seperti nilai suku bunga dan nilai tukar mata uang. Tujuan utamanya adalah demi mencapai stabilitas mata uang terlepas dari apakah itu dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Distribusi yang optimal, pemenuhan kebutuhan dasar, keringanan kerja, pertumbuhan ekonomi riil, dan stabilitas ekonomi hanyalah beberapa contoh sasaran stabilitas nilai tukar yang akan membantu pencapaian suatu bangsa di masa depan.

Praktek mata uang ini adalah hal terpenting pada sebuah perekonomian. Tetapi, sistem perekonomian yang memburuk akan mengandung perspektif yang berbeda dalam produksi uang. Sistem ekonomi konvensional memiliki perspektif yang berbeda tentang penciptaan uang dari sistem ekonomi Islam.

Tujuan dari kebijakan moneter Islam, yang merupakan komponen dari bentuk ekonomi syariah, adalah mempromosikan keseimbangan dan kemakmuran. Maqashid Syariah menjunjung tinggi keseimbangan (Iqamah al 'Adl), dengan memberikan keadilan pada segala kawasan kehidupan manusia, serta memperoleh kemaslahatan (Jalb al Maslahah), yaitu memperoleh kemaslahatan umum, tidak kemaslahatan tertentu bagi pemerintah yang bersangkutan.

Dalam situasi ini, kebijakan moneter menjadi faktor krusial dalam ketidakstabilan sistem ekonomi makro. Perekonomian yang stabil akan dicapai melalui kebijakan moneter yang sehat melalui mekanisme yang secara efektif mentransmisikan informasi tentang harga dan output, untuk gilirannya memiliki faktor pengganda pada bagian yang berbeda seperti biaya pekerja. Demikian pula, bentuk moneter yang tidak stabil bisa memperparah persoalan inflasi.

Dengan demikian, maksud dari penulisan ini yaitu untuk menganalisis kebijakan moneter dari perspektif ekonomi Islam.

¹ Wayan Sudirman, *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).

² Adhitya Wardhono and others, *Perilaku Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia* (Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2019).

Metode Penelitian

Metodologi yang dijalankan untuk analisis penelitian ini adalah metode kualitatif. Yang dimaksud dengan “analisis kualitatif” adalah setiap strategi penelitian yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: fokus dan multimetode, sifat altruistik dan holistik; mengukur kualitas menggunakan berbagai metode; dan menyebarluaskan temuan secara objektif. Dari sudut pandang yang berbeda dan jelas dapat dikatakan bahwa arah penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu fenomena atau masalah dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan pendekatan kualitatif.³

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan sekunder yang dikumpulkan dengan mengumpulkan informasi dari buku-buku akademik dan jurnal berbagai topik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan teknik dokumentasi dan studi literatur.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter merupakan strategi yang menyesuaikan kondisi ekonomi makro agar bisa berguna sebagaimana mestinya dengan mengatur jumlah uang yang tersedia untuk diperdagangkan. Sasaran dari strategi tersebut di atas adalah untuk mencapai stabilitas harga dan inflasi serta meningkatkan keseimbangan output. Sebagian besar lingkungan perekonomian kapitalis terpaut dengan sistem bunga, menyebabkan lingkungan uang tumbuh sangat cepat daripada ekonomi riil. Karena sektor keuangan menghasilkan pendapatan lebih cepat dari sektor riil.⁴

Pendapat lain juga menekankan bahwa metode perubahan peredaran mata uang suatu negara adalah praktik penciptaan uang. Bank sentral suatu negara biasanya menggunakan uang partai. Menurut kepercayaan populer, alat bank sentral yang dikenal sebagai "kebijakan moneter" dipergunakan untuk mengendalikan berbagai bagian keuangan, termasuk suku bunga dan nilai tukar.⁵

³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2016).

⁴ Nur Aini Latifah, ‘KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH’, *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, 11.2 (2015), 124 <<https://doi.org/10.21067/jem.v11i2.873>>.

⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018).

Kebijakan moneter adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan instrumen keuangan yang digunakan oleh bank sentral atau lembaga keuangan lainnya untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Contohnya adalah sejumlah uang dan/atau bunga. Kebijakan moneter merupakan inisiatif pemerintah demi memperkuat kondisi ekonomi dengan menetapkan tingkat cadangan devisa. Uang primer (M0), uang sempit (M1) dan uang luas (M2) terdiri dari satuan moneter (M2).⁶

Pada bentuk moneter konvensional, instrumen yang ditunjuk sebagai instrumen otoritas moneter adalah bunga yang digunakan untuk mendistribusikan uang kepada masyarakat. Di sisi lain, Islam melarang penggunaan alat musik bunga di tempat umum. Penekanan Islam pada hal-hal yang berkaitan dengan uang lebih menonjol dalam kajian ekonomi yang lebih luas. Akibatnya, regulator harus memastikan bahwa bisnis dan produk yang ditawarkan saat ini mampu memaksimalkan potensi investasi masyarakat. Mengingat hal ini, waktu yang dibutuhkan siapa pun dengan mata uang untuk mentransfer uang mungkin akan singkat, dengan waktu yang jelas memengaruhi kecepatan. Dengan kata lain, laju pembangunan ekonomi akan dipercepat dengan memberikan regulasi seperti izin usaha, produk syariah, dan layanan terkait lainnya kepada masyarakat.

Mengontrol suplai uang agar tidak beredar secara berlebihan adalah satu-satunya metode yang paling umum untuk menghasilkan uang. Jika tersedia banyak uang, maka akan terjadi inflasi yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan masyarakat umum untuk membeli barang. Dengan menaikkan atau menurunkan banyaknya uang beredar di masyarakat, ambang batas jumlah uang beredar ditetapkan. Dalam istilah moneter, ada dua hal yang dapat dilaporkan, yaitu:⁷

1. Pelaporan moneter yang dapat digunakan (kebijakan moneter ekspansif)
Kebijakan moneter ekspansif bertujuan untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar sebagai mata uang. Pada saat perekonomian mengalami fase resesi atau depresi, taktik ini digunakan untuk meningkatkan daya beli sehari-hari dan menaikkan respons masyarakat (permintaan publik). Selain itu, "kebijakan" digunakan untuk menunjukkan "longgar currency" (kebijakan uang mudah).
2. Kebijakan Moneter Kontraktif adalah jenis kebijakan yang menekankan pada jumlah maksimum uang yang dapat ditukarkan. Pernyataan ini dibuat karena

⁶ Wardhono and others.

⁷ Latifah.

perekonomian saat ini sedang mengalami inflasi. Sebutkan nilai tukar mata uang lebih detail (tight money policy).

Penulis lain mengubah Kebijakan Moneter menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Penggunaan statistik moneter Jelas bahwa tujuan jangka panjang bank sentral adalah untuk meningkatkan jumlah uang dan obligasi yang diperdagangkan di pasar. Mentransfer uang selama periode deflasi diperlukan. Ke depan, strategi pertumbuhan ekonomi saat ini akan ditingkatkan ke tingkat produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi dan akan memperkuat respons. Masyarakat umum telah mengurangi ketersediaan barang yang ditawarkan pada saat inflasi. Untuk itu perlu dilakukan perubahan cara pembayaran agregat melalui pembayaran tunai dan pembayaran kewajiban. Perubahan yang disebutkan di atas akan mengurangi pinjaman agregat sehingga terjadi konvergensi antara pinjaman agregat dan pinjaman individu dalam perekonomian.
- b. Kebijakan moneter kualitatif
 - 1) Langkah pertama dalam proses pengarsipan adalah mengidentifikasi kategori dokumen yang harus diajukan atau dihapus.
 - 2) Persuasi moral, atau bank sentral meyakinkan bank untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang dilarang, seperti ketika jumlah uang yang dipertaruhkan lebih tinggi atau ketika bank sentral dapat meminta bank untuk menghentikan penipuan kartu kredit.

Ada banyak hal yang mempengaruhi bagaimana pemerintah dan sistem perbankan menentukan jumlah uang yang akan berpindah tangan selama jangka waktu tertentu. Suku bunga pada dasarnya menjadi permanen begitu mereka diminta untuk mencatat jumlah uang yang ditawarkan dalam satu hari. Mengikuti permintaan informasi dan komentar, analisis parsial analitik dilanjutkan.

Penting untuk dipahami bahwa sistem moneter saat ini dalam keadaan volatilitas sementara, dan hal ini harus dikomunikasikan ke sektor perbankan untuk meningkatkan atau menurunkan pembayaran masing-masing ke sektor grosir dan eceran, seperti yang diharapkan. Untuk sistem moneter. Bagian ini termasuk dalam buku Pengantar Ekonomi Islam: Aplikasi Teoritis dan Praktis oleh Hossein Askari, Zamir Iqbal, dan Abbas. Penting untuk dicatat bahwa kebijakan moneter tidak stabil; Selain itu, fokus pada

sektor keuangan adalah untuk menambah atau mengurangi dukungan bagi perekonomian yang lebih besar dan bagi perekonomian yang lebih besar untuk terlibat dalam tindakan yang diantisipasi oleh pembuat kebijakan.⁸

Kebijakan moneter merupakan alat informasi publik yang sangat berpengaruh pada sistem ekonomi moneter, baik konvensional maupun syariah. Tetapi ada beberapa perbedaan yang jelas dalam tujuan dan prinsip dasar Islam.

Tujuan Kebijakan Moneter

Tujuan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sama dengan tujuan Bank Indonesia dalam UU No. 23 Tahun 1999, juga sejalan dengan UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Pasal 7. Rupiah yang stabil memiliki dua dimensi. Ukuran stabilitas rupiah yang pertama adalah ketahanannya terhadap fluktuasi harga barang dan nilai tukar akibat inflasi. Akibatnya, karakteristik kedua terkait dengan fluktuasi nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya.

Untuk melemahkan rupiah terhadap mata uang lainnya, Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang (*free floating*). Dalam upaya mencapai harga yang stabil dan sistem keuangan yang stabil, stabilitas nilai tukar cukup penting. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga mulai mengambil langkah-langkah untuk memastikan nilai tukar tetap stabil dan sesuai dengan *core value*-nya dengan tetap memantau berjalannya mekanisme pasar.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Bank Indonesia telah menerapkan *Inflation Targeting Framework* sejak 1 Juli 2005. (ITF). Ruang lingkup proyek saat ini sesuai dengan mandat dan standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini, inflasi merupakan pesan utama yang harus ditekankan (*overriding objective*). Untuk meningkatkan efektivitasnya, Bank Indonesia secara konsisten melakukan berbagai pemurnian kerangka kebijakan moneter sesuai dengan dinamika dan perubahan ekonomi yang terjadi.

Dalam upaya mencapai harga yang stabil dan sistem keuangan yang stabil, stabilitas nilai tukar cukup penting. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga meluncurkan kajian volatilitas mata uang untuk menurunkan volatilitas mata uang yang lebih tinggi

⁸ Hossein Askari, Zamir Iqbal, and Abbas Mirakhor, *Introduction to Islamic Economics* (Singapore: John Wiley and Sons Singapore, 2015).

dari biasanya daripada meningkatkan volatilitas mata uang ke level tertentu. Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan moneter dengan mengembangkan target uang (seperti jumlah uang beredar atau suku bunga) sesuai dengan tujuannya.

Apalagi dibandingkan dengan angka inflasi yang diberikan oleh pemerintah. Secara operasional tujuan kebijakan moneter ini menggunakan berbagai instrumen seperti operasi pasar terbuka di pasar valuta asing baik dalam rupiah maupun mata uang lainnya, penetapan batas pembayaran, penetapan cadangan minimum dan pengaturan kredit atau pinjaman. Selain itu, Bank Indonesia dapat melakukan transaksi keuangan sehari-hari sesuai dengan hukum Syariah.

Prinsip – prinsip Kebijakan Moneter

Sistem moneter Islam didasarkan pada prinsip ekonomi Islam berikut ini:⁹

1. Cita-cita tertinggi adalah milik Allah, satu-satunya pemilik mutlak.
2. Manusia adalah penguasa bumi (kholifah), namun tidak pemilik sebenarnya.
3. Semua kekayaan serta keuntungan umat muslim adalah hasil dari rahmat Allah, dan akibatnya, saudara-saudaranya yang sedikit nakal pun berhak membela diri terhadap saudara-saudaranya yang sama-sama nakal.
4. Kekayaan tidak bisa diulang atau disiarkan ulang.
5. Kekayaan harus dikeluarkan.
6. Mengatasi ketidakseimbangan antara standar ekonomi individu dapat mengurangi konflik antar pemerintah.
7. Menegaskan kembali kewajiban mendesak dan tak terhindarkan yang dimiliki setiap orang, terutama mereka yang tergabung dalam komunitas yang tidak patuh.

Sistem moneter syariah harus jauh dari unsur riba dan obligasi bank. Dalam ekonomi Islam, dilarang menggunakan uang di bank, bahkan riba. Dengan pelarangan ini, bunga bank yang dianggap sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan tidak lagi beroperasi. Sistem moneter Islam didasarkan pada aturan emas untuk sukses. Prinsip kebijakan moneter yang sehat lainnya meliputi:

⁹ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 4th edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

- a. Ini memiliki satu tujuan utama, yaitu meningkatkan rasa aman masyarakat (sasaran inflasi), sebagai kontribusi utamanya. Dalam hal ini, strategi inflasi diterapkan dengan menyeimbangkan biaya (trade-off) dengan pertumbuhan ekonomi.
- b. Agar uang lebih antisipatif (berwawasan ke depan), perlu diarahkan uang yang digunakan saat ini untuk memenuhi tujuan inflasi yang akan diamati di masa depan dengan tetap memperhatikan kemungkinan terjadinya inflasi. lag dalam efek uang beredar.
- c. Pelajari tentang mekanisme spesifik yang digunakan untuk menghasilkan respons pemilihan biaya untuk permintaan pendanaan. Pada tahap awal respons kebijakan moneter, bank sentral mempertimbangkan ekspektasi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan banyak faktor lainnya. Meliputi pembahasan tentang kebijakan ekonomi pemerintah sebagai bagian dari koordinasi moneter dan kebijakan ekonomi makro lainnya.
- d. Sesuai dengan prinsip “good governance” meliputi “tujuan yang jelas, konsistensi, transparansi dan akuntabilitas”.

Instrument – instrument Kebijakan Moneter Islam

Tujuan Islam untuk kebijakan moneter pada dasarnya sama dengan kebijakan moneter pada umumnya, yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar (baik internal maupun eksternal), mendorong keragaman instrumen moneter, memastikan transparansi sistem, dan memastikan mekanisme pasar yang efektif untuk memungkinkan antisipasi ekonomi. ekspansi. Tujuan stabilitas mata uang adalah untuk mencapai kepatuhan dan ketulusan dalam hubungan manusia. Sekalipun tujuan akhir tidak tercapai, proses yang diikuti pada dasarnya berbeda dari apa yang diterima secara umum.

Terkait dengan target dan instrumentasi. Perbedaan dari kedua jenis instrumen yang dimaksud adalah prinsip syariah melarang campur tangan terhadap nilai nominal atau tingkat pengembalian (suku bunga). Oleh karena itu, jika tujuan operasi keuangan dikaitkan, secara otomatis operasi keuangan berdasarkan hukum Islam tidak dapat menetapkan suku bunga sebagai target atau prinsip operasional.

Instrumen keuangan Islam diatur oleh Syariah. Hampir setiap instrumen keuangan yang digunakan dalam transaksi mata uang tradisional serta semua kontrak

harga open-end yang menjadi dasarnya berbasis bunga. Oleh sebab itu, bagian konvensional yang mengandung suku bunga (seperti suku bunga bank, suku bunga diskonto, dan operasi pasar terbuka dengan suku bunga tetap di bawahnya) tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi uang berbasis syariah. Namun, menurut banyak ekonom Islam, sejumlah instrumen kontrol mata uang konvensional, seperti Reserve Requirements, dapat digunakan untuk mengelola uang dan kredit, memilih jalur kredit, menjalankan pengaruh moral, dan mengubah basis moneter. Operasi pasar juga dapat didefinisikan melalui bentuk keamanan berdasarkan integritas (sekuritas berbasis ekuitas).

Islam tidak membolehkan sistem suku bunga, sehingga bank sentral tidak bisa menetapkan batas saldo yang sesuai. Bank sentral Islam membutuhkan peralatan dengan matriks antena yang halus untuk menjaga standar keuangan Islam yang sehat. Dalam situasi ini, tersedia beberapa aturan bebas bunga yang dapat diterapkan bank sentral untuk menambah atau mengurangi saldo kas. Keterbatasan sistem bunga membuat tidak mungkin untuk mengubah nilai tukar mata uang dalam perekonomian.

Secara spesifik, Chapra mendefinisikan bahwa, instrumen kebijakan moneter yang tepat dengan hukum Islam harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁰

1. Target M dan Mo Pertumbuhan Setiap tahunnya, bank sentral tetap menjaga jumlah uang beredar (M) sama dengan kebijakan ekonomi nasional. Pertumbuhan M terhubung ke Mo dengan cara yang salah (uang berkapasitas tinggi: uang beredar dan simpanan di bank sentral). Bank sentral harus memberikan ketentuan yang jelas untuk MO yang disetujui untuk digunakan oleh pemerintah, bank umum, dan lembaga keuangan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Mo yang tersedia bagi bank komersial, khususnya dalam wujud mudharabah, harus dilakukan oleh bank sentral untuk alat kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan kredit.
2. Kepentingan Publik terhadap Kinerja-Related Deposits/Currency Deposits (Bagian Publik dari Giro) Rekening giro dari bank komersial dalam jumlah yang ditentukan di atas (minimal 25%) harus dikomunikasikan kepada pemerintah untuk mendanai inisiatif program sosial yang menguntungkan.

¹⁰ M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

3. Bank komersial harus memiliki ritme yang diperlukan dalam jumlah yang ditetapkan di bank sentral. GWM membantu dalam penjaminan simpanan dan membantu mengurangi kebutuhan likuiditas bank. Demikian pula, bank sentral harus mengurangi biaya yang dikenakan untuk memindahkan uang yang diberikan kepadanya oleh bank komersial lokal.
4. Kebijakan kredit (Credit limit) Kebijakan batas kredit yang ditetapkan oleh bank umum untuk memastikan bahwa keputusan kredit dibuat sesuai dengan tujuan keuangan dan untuk mendorong persaingan yang sehat antara bank umum.
5. Alokasi kredit berbasis nilai.
Realisasi pinjaman tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan masyarakat. Akses ke kredit membantu memaksimalkan produksi dan distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh mayoritas penduduk. Manfaat mengajukan pinjaman juga bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan umum penduduk. Ini membutuhkan batas kredit yang ditetapkan oleh pemerintah dan bank komersial untuk mengurangi risiko dan uang yang dibayarkan ke bank.
6. Teknik Lainnya.
Untuk mewujudkan kebutuhan ini, teknik kuantitatif dan kualitatif yang dibahas di atas harus dipadukan dengan ahli lain, seperti persuasi moral atau penalaran moral. Beberapa alternatif instrumen mata uang yang bisa digunakan oleh bank sentral adalah sebagai berikut:
 - a. Simpanan pemerintah Kekuatan bank sentral untuk mentransfer rekening giro pemerintah bank komersial dengan bank sentral secara langsung mempengaruhi cadangan bank komersial.
 - b. Secara bersamaan mengubah nilai tukar semua bank Di bank cadangan komersial Tujuan dari pertukaran adalah untuk meningkatkan nilai tukar secara bersamaan.
 - c. Kumpulan bersama ini didasarkan pada prinsip saling percaya di tempat kerja dan mewajibkan bank komersial untuk menyimpan sebagian simpanannya pada tingkat tertentu untuk melindungi permintaan likuiditas yang mereka terima dari bank lain.

- d. Instrumen berbasis saham Menjual dokumen, saham, dan sertifikat dengan harga tinggi untuk hasil berbasis analisis. Instrumen ini dapat digunakan untuk mengimbangi obligasi pemerintah dalam perdagangan pasar.
- e. rasio laba rugi yang telah berubah
Bank sentral menawarkan tarif yang berbeda bagi hasil usaha mudharabah bagi bank umum dan transfer rekening bagi pemilik usaha.
- f. dr. Sidiqi, hubungan refinancing, adalah jenis pinjaman yang ditawarkan bank sentral kepada bank komersial sebagai pembayaran atas qordhul hasan yang mereka berikan.
- g. hubungan pinjaman
Rasio mitigasi kredit adalah jenis giro yang dapat dipertahankan dengan bank sentral sebagai bagian dari qordhul hasan yang diberikan lembaga kepada nasabahnya.

Kesehatan sistem moneter keuangan Islam tidak dapat dijamin oleh suku bunga yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi atau kebutuhan untuk menstabilkannya. Bank sentral menyesuaikan jumlah uang beredar dengan kebutuhan mayoritas Muslim dan ekonomi riil. Pertumbuhan M dapat disesuaikan untuk mencapai kesejahteraan yang optimal, terdiversifikasi dan realistis dengan harga yang stabil. Tujuan M dicapai dengan mencapai hasil yang diinginkan melalui kombinasi khusus dari pengeluaran defisit dan pinjaman mudharabah yang dilakukan oleh bank sentral ke berbagai lembaga keuangan.

Implikasi Pembangunan Ekonomi dari Kebijakan Moneter

Efek perkembangan atau efek kebijakan moneter dapat dibagi menjadi dua kategori yang bermanfaat.

1. Pengaruh perkembangan ekonomi yang timbul dari dan sebagai akibat dari kebijakan moneter yang dilaksanakan dalam rangka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
2. Menghentikan pertumbuhan ekonomi yang terpantau dan berkelanjutan dari kebijakan moneter melalui strategi aksi aktif yang ditujukan untuk meredam

gejolak ekonomi dan pertumbuhan ekonomi melalui instrumen kebijakan moneter.

Pengaruh pembangunan ekonomi pada kategori pertama, yang timbul dari kebijakan moneter, adalah penggunaan tingkat bunga sebagai instrumen kebijakan moneter dan sebagai harga modal. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah mengubah semua sistem keuangan dan perbankan menjadi sistem berbasis bunga. Ini dilakukan dengan memperkenalkan semua jenis praktik perbankan berbasis bunga ke dalam sistem moneter dan keuangan. Sistem keuangan dan perbankan bagi hasil menghasilkan dua isu penting dalam pembangunan ekonomi, yaitu pemanfaatan sumber daya keuangan yang dapat diinvestasikan secara maksimal dan efisiensi.¹¹

Bunga dapat memperkecil besarnya investasi, sehingga investasi tidak dapat dimaksimalkan atau dimaksimalkan. Misalnya, jika suku bunga terkait dengan data pinjaman adalah $x\%$, ROI dapat direalisasikan menggunakan data ini hingga $x\%$ efisiensi marjinal modal (MEC = tingkat pengembalian yang diharapkan).⁸ Dengan kata lain, investasi hanya dapat dilakukan jika efisiensi marjinal modal lebih besar atau lebih kecil daripada tingkat bunga atas pembayaran yang tunduk pada perdagangan. Jika tingkat diskonto obligasi adalah x dan utilitas marjinal modal lebih dari $x\%$, peningkatan investasi hanya akan meningkatkan diskonto obligasi dan meningkatkan laba.

Sebaliknya, investasi dapat dilakukan lebih cepat saat menggunakan sistem perbankan dan mata uang yang didasarkan pada kesuksesan atau tidak memiliki MEC. Karena pembagian keuntungan antara perusahaan dan bank didasarkan pada rasio keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, terlepas dari MEC, baik organisasi maupun lembaga komersial dan keuangan, mendapat manfaat dari hasil positif selama MEC tetap di atas ambang batas atau nol. Hal ini dimungkinkan karena pinjaman modal tidak dikenakan biaya bunga. Bahkan jika tingkat ekspektasi atau MEC meningkat sementara volume investasi menurun, masih memungkinkan untuk terus berinvestasi dan menghasilkan keuntungan positif hingga MEC mencapai garis nol. Poin ini menunjukkan bahwa berinvestasi dalam keuangan Islam adalah strategi pengembalian yang tinggi. Oleh karena itu, tingkat investasi dalam proyek dan program ekonomi

¹¹ Ahmad Mansyur, 'Potensi Tabungan, Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam', *Keislaman Program Pasca Sarjana "AKADEMIKA" IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 13.1 (2003).

berbasis pendapatan atau bebas bunga lebih besar daripada tingkat investasi dalam ekonomi berbasis bunga. Tingkat investasi cenderung berdampak positif pada lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan aspek ekonomi lainnya, termasuk kewirausahaan.

Mengalokasikan sumber daya dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi lebih efisien dibandingkan dengan investasi yang lebih tinggi dalam sistem pra-ekonomi bagi hasil (bebas bunga). Misalnya, bank atau lembaga keuangan hanya akan mengalokasikan dana untuk proyek tertentu kepada perusahaan dengan peringkat kredit atau kelayakan kredit yang baik. Sebaliknya, selain mengembalikan modal yang digunakan untuk membiayai proyek, perusahaan harus meningkatkan pengembalian atau pertumbuhan yang diharapkan. Bank dan lembaga keuangan mengambil langkah ini karena kelayakan kredit yang lebih baik, juga dikenal sebagai kelayakan kredit korporasi, dan peningkatan kesempatan untuk menerima modal ini ditambah bonus tanpa tingkat pengembalian minimum atau tujuan investasi yang disyaratkan.

Bank bebas bunga atau bank yang berorientasi pada hasil memilih proyek dengan pengembalian tinggi atau pengembalian yang diharapkan dalam keadaan lain, dan juga cenderung meningkatkan kelayakan kredit perusahaan. kepada investor karena hasil (keuntungan) yang dilaporkan berhubungan langsung dengan produktivitas dan likuiditas perusahaan. Dengan demikian, dana yang tersisa hanya dapat digunakan untuk strategi dan proyek investasi yang lebih produktif, menunjukkan bahwa alokasi dana saat ini juga lebih efisien. Speaker ini memiliki efek peredam yang menguntungkan pertumbuhan ekonomi.

Penghapusan bunga, yang merupakan salah satu aspek ekonomi uang, berdampak positif pada distribusi pendapatan dan kekayaan. Karena pertumbuhan ekonomi tidak banyak meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama pendapatan dan kekayaan yang dihasilkannya hanya dapat diidentifikasi dan didistribusikan di antara kelompok populasi tertentu. Hanya dalam sistem ekonomi bebas bunga dapat terjadi distribusi pendapatan dan laba yang adil, di mana pengembalian modal yang diinvestasikan menguntungkan mereka yang mengikuti strategi bisnis yang tepat. Pengembalian yang diharapkan, juga dikenal sebagai pengembalian atas modal yang diinvestasikan, yang diterbitkan oleh bank dan perusahaan mungkin berbeda dari angka yang dipublikasikan secara publik, karena pengembalian yang diharapkan adalah perkiraan berdasarkan hasil yang dipublikasikan sebelumnya. Dengan metode distribusi

yang sama, seorang pedagang tidak selalu bisa menjadi lebih sukses, bahkan jika dia mendapat lebih banyak keuntungan. Ini dimungkinkan dalam ekonomi obligasi, di mana setiap pengusaha hanya perlu menanggung biaya minimal yang terkait dengan strategi investasi obligasi. Ini benar terlepas dari investasi investor, selama mereka mendapatkan semua manfaat dari strategi tersebut setelah membayar obligasi dalam jumlah besar ke bank terkemuka.

Dampak dari perkembangan ini harus ditanggapi dalam kebijakan moneter, yang membalikkan peran suku bunga sebagai alat kebijakan moneter dan sebagai harga modal. Efeknya dapat bekerja bahkan jika taktik aktif tidak ditujukan pada kebijakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tertentu.

Pengaruh pembangunan ekonomi yang dihasilkan dari kebijakan moneter kategori kedua adalah kegiatan aktif untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang dapat dicapai melalui kebijakan moneter. alat musik Jika sebuah bank nasional ingin memperluas sumber daya keuangannya, ia harus mensyaratkan bank komersial untuk membayar investor bagian keuntungan yang lebih tinggi dengan meningkatkan rasio pembayaran (profit ratio) kepada investor. Hal ini meningkatkan investasi bank dalam proses pengelolaan uang sehari-hari. Selain itu, Bank Negara dapat menentukan jumlah kredit yang diberikan atau menerapkan pertumbuhan uang beredar dengan menurunkan GWM, rasio kredit, rasio permintaan deposit, dan pengembalian modal yang ditanamkan (financing ratio). Sebagai hasil dari situasi ekonomi di atas, bank mengoptimalkan penggunaan uang tunai yang tersedia dengan menawarkan berbagai jalur kredit untuk proyek investasi kepada pelanggan dan pemilik usaha kecil. Kebijakan moneter yang dijelaskan di atas seharusnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Alat kebijakan moneter lainnya mungkin tersedia, seperti B. regulasi kredit atau pinjaman berbasis difusi, dan bujukan moral dapat digunakan untuk meningkatkan tingkat umum dan regional dari aktivitas ekonomi sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah dapat mendorong dan menekan bank-bank komersial untuk memberikan pinjaman kepada industri terbelakang di daerah tersebut, industri terbelakang yang membutuhkan kredit, kepada pemerintah daerah terkait dan berbagai organisasi masyarakat yang membutuhkan dukungan keuangan. Mencapai tingkat pertumbuhan

dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (tidak ada ketimpangan ekonomi), untuk mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan adil ke sektor atau sektor apa pun, ke daerah atau wilayah apa pun, ke industri atau industri apa pun, dan ke kelompok atau organisasi massa apa pun.

Kebijakan moneter dalam kaitannya dengan aliran atau siklus ekonomi tidak boleh memiliki kelemahan yang akan membuatnya rentan terhadap eksploitasi riba dalam ekonomi Islam. Selain itu, para gubernur bank sentral mempertahankan beberapa alat keuangan untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi, seperti B. suku bunga utama, batas kredit yang ditetapkan oleh bank komersial atau basis kredit, rasio laba, pembiayaan dan pinjaman, dan operasi pasar terbuka. Perilaku moral konsisten dengan tujuan bank sentral.

Negara berkembang biasanya memperkenalkan lembaga keuangan baru yang disebut "bank konstruksi" yang bertindak sebagai "pemasok dan pemodal" untuk proyek industri seperti lapangan kerja industri dan perluasan industri. Karena dana tersebut harus digunakan untuk membiayai proyek-proyek industri, baik industri konsolidasi maupun industri ekspansif. Dalam pengertian ini, setiap bank syariah adalah bank komersial yang meminjamkan uang untuk pembiayaan berbasis ekuitas. Akibatnya, pinjaman yang diberikan oleh bank syariah biasanya digunakan untuk proyek promosi, administrasi, dan komersial. Bank syariah juga dapat mengontrol faktor-faktor penting dalam proses industrialisasi dan berpartisipasi dalam kebijakan moneter yang ditentukan oleh ahli keuangan dengan menggunakan instrumentasi suku bunga sistem keuangan.

Hal terakhir yang sangat penting yang dapat dilakukan dan direkomendasikan oleh para ekonom Islam adalah menggunakan semua alat moneter paling efektif dan efisien yang tersedia untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Bagi orang yang menilai uang menurut prinsip al-Qard al-hasan, devaluasi mata uang adalah pertanda datangnya bencana, dan inflasi berujung pada kematian mereka. Oleh karena itu, pemerintah dan para ekonom harus rela bekerja untuk menjaga stabilitas nilai tukar.¹²

Banyak ekonom Muslim, termasuk beberapa cendekiawan, setuju bahwa mempertahankan nilai tukar yang stabil tanpa inflasi yang meluas adalah tugas yang sulit, karena inflasi yang meluas dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan

¹² M. Umer Chapra, "Money and Banking in an Islamic Economics". Dalam Mu- Hammad Ariff (Ed.), *Monetary and Fiscal Economic of Islam* (Jeddah: Center for Research in Islamic Economics, 1982), pp. 145–72.

mencegah Muslim menetapkan harga sendiri. Dalam dunia keuangan, para ahli mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi hampir selalu disebabkan oleh kenaikan harga dibandingkan harga sebelumnya. Dalam situasi di mana praktik pinjaman al-Qard al-Hasan terjadi di masyarakat, Nabi (saw) secara historis tidak membiarkan harga naik tanpa kontrol negara. Selanjutnya, indeksasi tidak dilakukan untuk mengendalikan inflasi atau menghilangkan penyebab inflasi.

Menurut prinsip Al-Qard al-Hasan, seseorang yang memberikan dukungan keuangan melakukannya untuk Allah (swt) dan kemudian menerima pembayaran dari-Nya. Ini adalah peluang bagus untuk menuntut waktu yang hilang (menggunakan uang pinjaman) dan kemungkinan melemahnya dolar (karena inflasi) jika terjadi inflasi. Depresiasi mata uang dalam hal ini tidak berarti ketidakadilan, tetapi karena perilaku yang tidak adil (menempatkan kepentingan orang lain di atas keuntungan diri sendiri).

Fenomena Al-Qard al-Hasan yang muncul dan aktif di masyarakat umum agak berbeda dengan yang terjadi di industri keuangan dan perbankan. Lembaga keuangan dan perbankan merupakan lembaga perantara bagi nasabah yang menitipkan dan meminjamkan uang, dan hal ini memerlukan kebijakan yang cermat dalam penerapan hubungan perkreditan dalam bentuk Al-Qardh Al-Hasan ketika mencoba memahami fenomena tersebut. memiliki beberapa masalah serius. Pertama, deposan wajib melaporkan kepada bank setiap kekhawatiran yang berkaitan dengan pinjaman di bawah prinsip khusus al-Qardh al-Hasan. Dalam hal ini, prinsip utama al-Qard al-Hasan yang berlaku bagi perorangan juga berlaku bagi bank, yaitu bahwa bank secara hukum bertanggung jawab dan wajib bertindak sebagai perantara para penyimpan untuk mendapatkan kembali dana yang disimpannya. Bank mengikuti prinsip ini. Oleh karena itu, untuk menutup kerugian yang diderita para deposan, sebelum mengumumkan pembagian simpanan tersebut, bank mencadangkan pembagian kas berdasarkan keuntungan yang diperoleh.

Singkatnya, inflasi yang ringan dan terkendali diperbolehkan dalam ekonomi Islam dan tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat, meskipun inflasi yang ringan pun dapat mendorong pembangunan ekonomi.

Penutup

Kebijakan moneter adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan instrumen keuangan yang digunakan oleh bank sentral atau lembaga keuangan lainnya untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Contohnya adalah sejumlah uang dan/atau bunga.

Tujuan menghasilkan uang adalah untuk mencocokkan dan mempertahankan nilai tukar rupee. Tujuan ini sama dengan tujuan Bank Indonesia dalam UU No. 23 Tahun 1999 yang juga tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 tentang Pasal 7.

Prinsip dasar ekonomi Islam adalah sebagai berikut: Pemilik tertinggi dari segala sesuatu adalah Allah, dan Dia sendirilah sumber kekuatan mutlak. Manusia adalah penguasa (kholifah) dunia yang sebenarnya, meskipun dia bukan penguasa yang sebenarnya. Segala sesuatu yang dimiliki dan diterima umat manusia berasal dari rasa takut kepada Allah, dan akibatnya, bahkan saudara-saudaranya yang lebih takut pun memiliki hak untuk membela diri terhadap kekayaan mayoritas saudara-saudara mereka yang lebih menakutkan. Kekayaan tidak bisa diabaikan atau terlalu lama diabaikan, juga tidak bisa dikubur. Sebaliknya, itu harus dikedepankan, bersama dengan langkah-langkah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar masyarakat, mencegah konflik antar pemerintah, dan menekankan pentingnya kewajiban yang dipahami perlu dan adil untuk semua orang, termasuk anggota biasa yang tidak patuh. publik.

Instrumen keuangan Islam diatur oleh Syariah. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk menjamin kestabilan nilai rupiah dalam UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Contoh instrumen keuangan syariah digunakan di berbagai negara antara lain Sudan dan Indonesia. Dalam sistem perekonomian tradisional, peran uang disejajarkan pada fungsi komoditas, menghasilkan pasar di mana uang menjadi komoditas utama dan ukuran nilai. Pasar ini adalah pasar keuangan yang terkait erat dengan pasar fisik (untuk barang dan jasa) dan termasuk pasar uang, komoditas, obligasi, dan derivatif. Akibatnya, sektor keuangan dan industri ekonomi tradisional berubah dengan cepat.

Sebagai penjelasan, penulis ingin menyampaikan bahwa meskipun moneterisme saja tidak cukup bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang diinginkan, pemerintah tetap perlu menggunakan fiskal dan moneterisme dalam proses

bisnisnya untuk mencapai level yang lebih tinggi. dan produksi barang dan mata uang jangka panjang yang lebih stabil. Akibat akselerasi produksi, barang dan persediaan kini disimpan dalam bentuk lama, yang berdampak negatif pada perekonomian masyarakat umum. Oleh karena itu, baik kebijakan ekonomi maupun material harus memiliki cakupan yang lebih luas untuk mencapai tujuan utama kedua kebijakan tersebut, yaitu kemampuan menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing dan stabil di pasar untuk meningkatkan produksi dan pendapatan.

Daftar Rujukan

- Askari, Hossein, Zamir Iqbal, and Abbas Mirakhor, *Introduction to Islamic Economics* (Singapore: John Wiley and Sons Singapore, 2015)
- Chapra, M. Umer, “*Money and Banking in an Islamic Economics*”. Dalam *Muhammad Ariff (Ed.), Monetary and Fiscal Economic of Islam* (Jeddah: Center for Research in Islamic Economics, 1982)
- , *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 4th edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Latifah, Nur Aini, ‘KEBIJAKAN MONETER DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH’, *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, 11.2 (2015), 124 <<https://doi.org/10.21067/jem.v11i2.873>>
- Mansyur, Ahmad, ‘Potensi Tabungan, Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam’, *Keislaman Program Pasca Sarjana “AKADEMIKA” IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 13.1 (2003)
- Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Sudirman, Wayan, *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Wardhono, Adhitya, Yulia Indrawati, Ciplis Gema Qoriah, and M. Abd. Nasir, *Perilaku Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia* (Jawa Timur: Pustaka Abadi, 2019)
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2016)